



KONTRIBUSI GENERASI MILENIAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM (MENGAWAL **DEMOKRASI** MELAWAN **DUITOKRASI**)

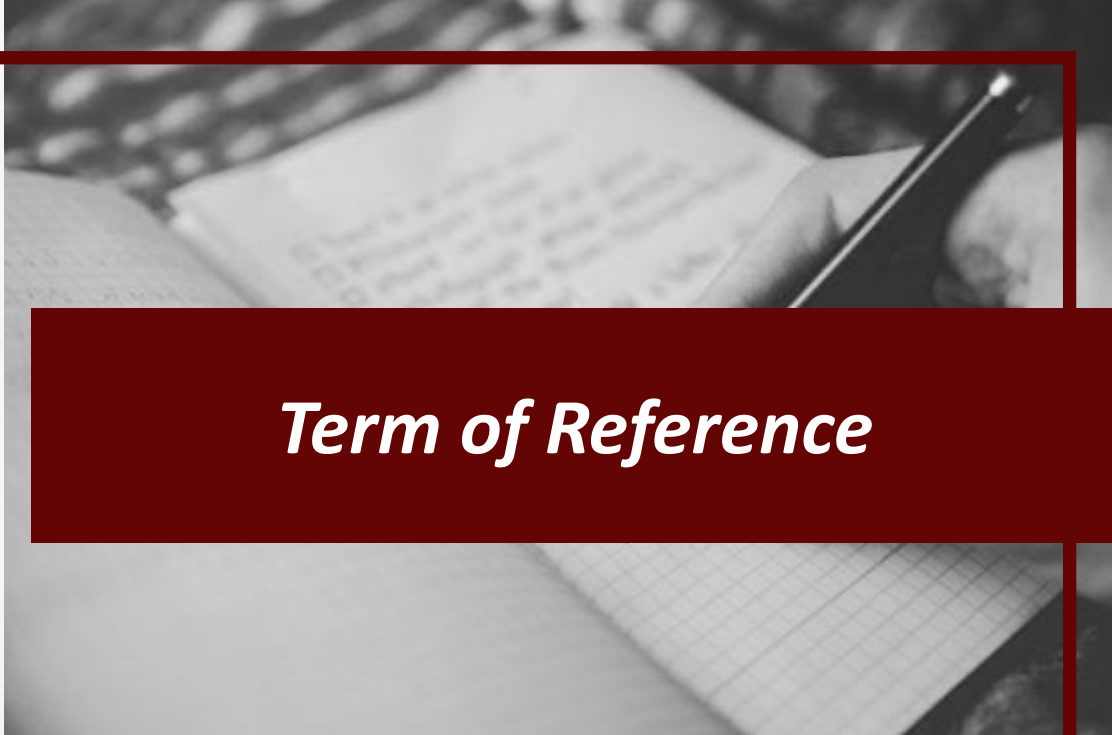


Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar HTN dan Senior Partner INTEGRITY Law Firm

*Simposium dan Diskusi Publik
HTN HMPS HTN UIN JAKARTA
Melbourne, 20 November 2021*

**1. Potret Pembangunan
Hukum, Perlindungan
HAM, dan
Pemberantasan Korupsi
di Indonesia**

**2. Peran Generasi
Millenial?**



Term of Reference

1 | Potret Pembangunan Hukum, Perlindungan HAM, dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Arah Penegakan Hukum Dalam Visi-Misi Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. Ma'ruf Amin

VISI

Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong
Royong



MISI

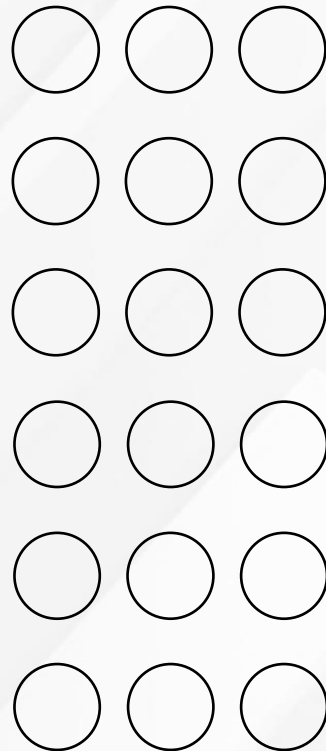
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Perbaikan penegakan hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi **TIDAK TERMASUK** ke dalam arah kepemimpinan sejak awal

Arah Kepemimpinan Dalam Pidato Pelantikan Presiden:

- a) Pertama, **pembangunan SDM** akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis
- b) Kedua, **pembangunan infrastruktur** akan kita lanjutkan.
- c) Ketiga, segala bentuk kendala **regulasi harus kita sederhanakan**, harus kita potong, harus kita pangkas. Menciptakan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM
- d) Keempat, **penyederhanaan birokrasi** harus terus kita lakukan besar-besaran
- e) Kelima, **transformasi ekonomi**. Merubah dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saling manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi

Pidato Pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober 2019



DUITokrasi Kills Indonesian **DEMO**cracy

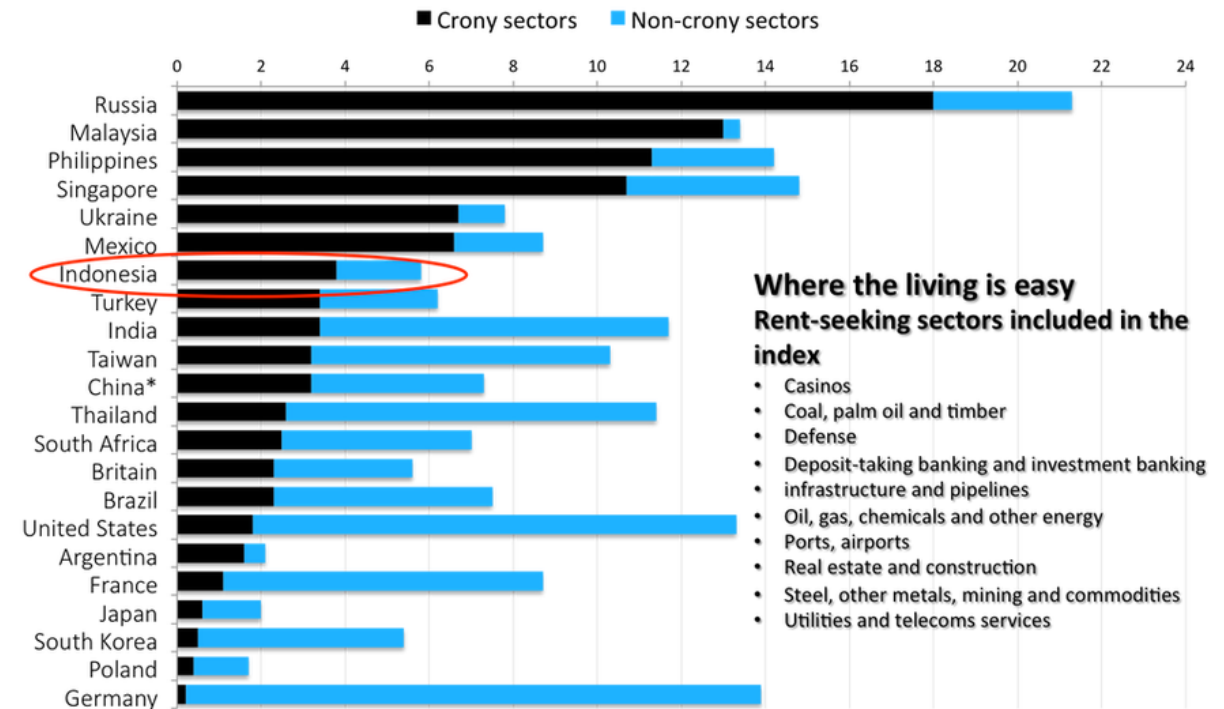
Sistem Politik yang Koruptif

- Pendanaan Politik
- Pendanaan Kampanye

Bisnis yang kolusif antara Pemerintah dengan Pengusaha

The crony-capitalism index

Billionaire wealth as a % of GDP, ranked by crony-sector wealth, 2016



Where the living is easy
Rent-seeking sectors included in the index

- Casinos
- Coal, palm oil and timber
- Defense
- Deposit-taking banking and investment banking
- infrastructure and pipelines
- Oil, gas, chemicals and other energy
- Ports, airports
- Real estate and construction
- Steel, other metals, mining and commodities
- Utilities and telecoms services

*Includes territories.

Source: The Economist, Daily chart: Comparing crony capitalism around the world (<http://econ.st/24zXocv>).

Oligarch, Media Control, and Elections

- Major media groups own five out of six Indonesian newspapers with the highest circulation, and all four biggest online news media sites. Further, ownership of TV stations is concentrated in five corporations that control 96,6% of all national stations.
- The parties become vulnerable to and dependent on oligarch - a wealthy individual or conglomerates who dominate Indonesia political parties.



Oligarch: Penguasa berpilin
dengan pengusaha

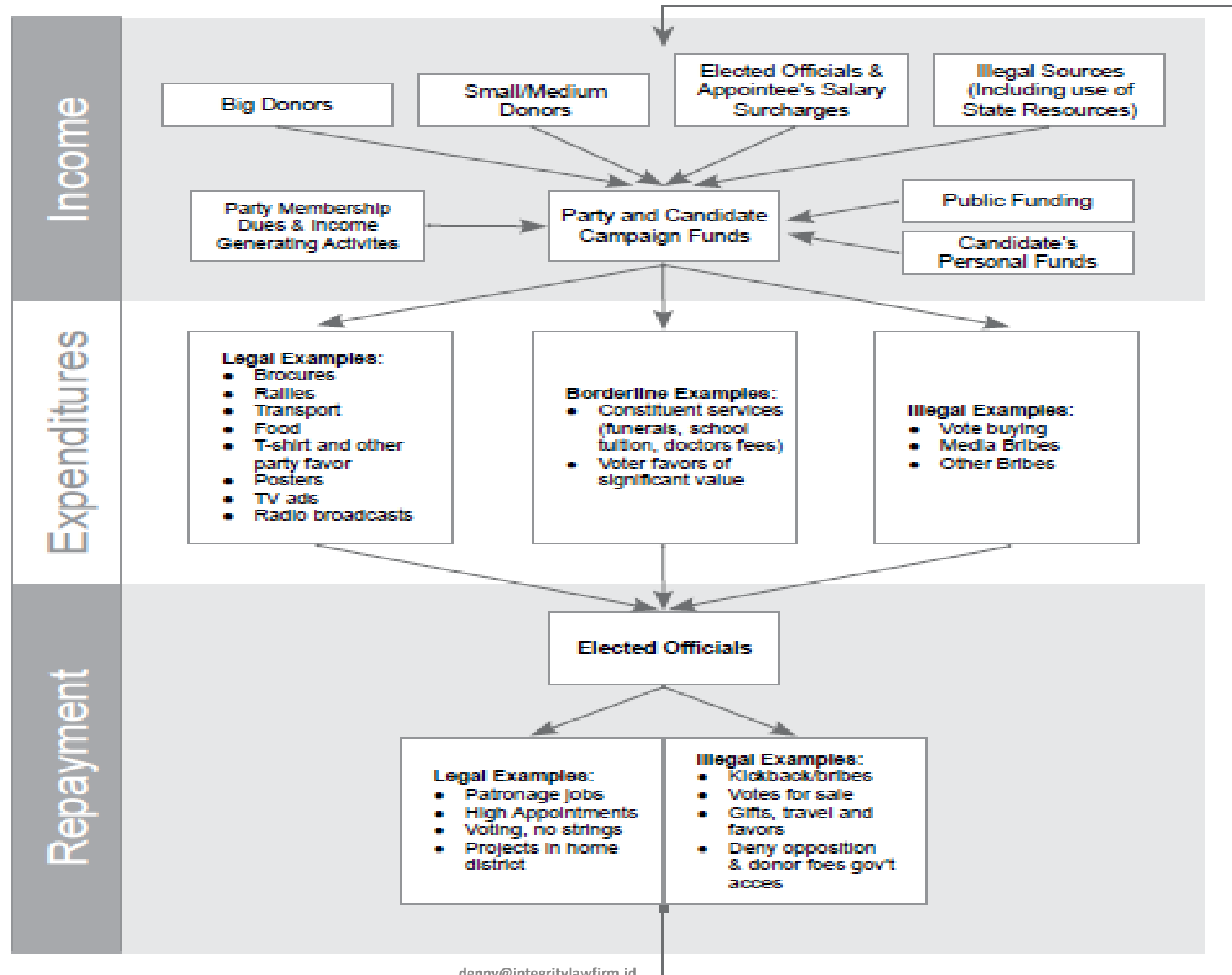
Parpol yang **Koruptif**

Media yang **Terkooptasi**

Oknum Aparat Keamanan

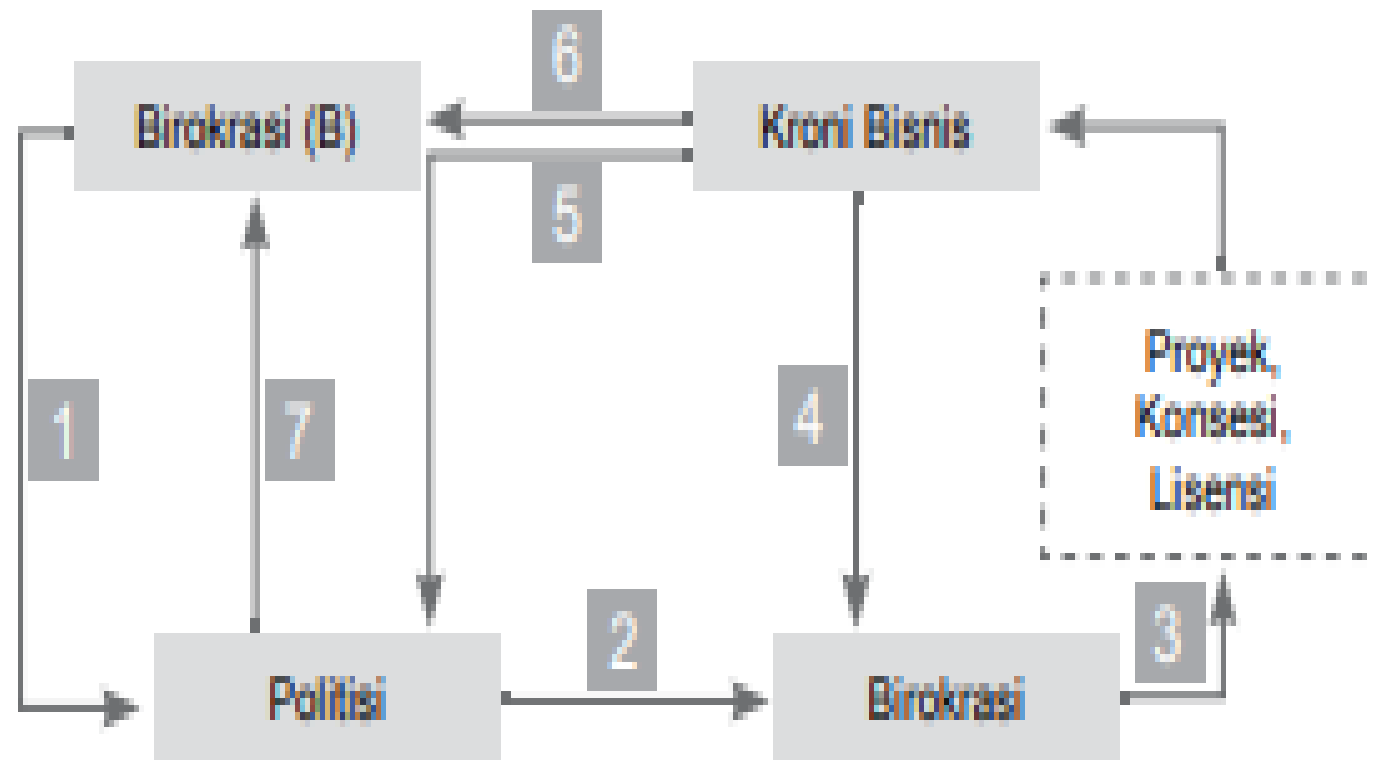
The **Real**
Power
Holders

HOW MONEY CAN INFLUENCE POLITICS



Source: Duschinsky

Lingkaran Setan Korupsi Politik



Keterangan:

1. Nominasi
2. Politisasi Birokrasi
3. Kontrak, konsesi, lisensi
4. Suap, kickback
5. Sumbangan Pemilu, Suap
6. Sumbangan Pemilu, *candidacy buying*
7. Setoran ke Partai

Implikasi dari Strategi Pembangunan Hukum dan Penegakan HAM yang Problematis

Aspek Pembangunan Hukum

KEPASTIAN HUKUM BERBANDING LURUS DENGAN KEPERCAYAAN INVESTOR

	PERINGKAT KEPASTIAN HUKUM	SKOR KELAYAKAN INVESTASI
SINGAPURA	12	98
MALAYSIA	47	76
INDONESIA	59	60

SUMBER: WORLD JUSTICE PROJECT 2020

SUMBER: S&P 2020

Peringkat kelayakan investasi yang rendah mengakibatkan perlambatan pembangunan kesejahteraan daerah. Aspek ini yang juga harus menjadi pertimbangan DPD RI dalam penyusunan kebijakan legislasi.

RULE OF LAW INDEX INDONESIA 2020

Tahun	Index
2015	0.52
2016	0.52
2017-2018	0.52
2019	0.52
2020	0.53

- Peningkatan 0.01 dalam 5 tahun
- Index berada jauh dibawah rata-rata regional
- Korupsi masih menjadi faktor yang memprihatinkan

INDONESIA	Index	Global Average	Regional Average
	0.53	0.56	0.60

Factor	Index	Global Average	Regional Average
Constraints on Government Powers	0.68	0.55	0.58
Absence of Corruption	0.39	0.52	0.60
Open Government	0.55	0.52	0.56
Fundamental Rights	0.52	0.56	0.57
Order and Security	0.68	0.72	0.79
Regulatory Enforcement	0.55	0.54	0.61
Civil Justice	0.46	0.55	0.59
Criminal Justice	0.39	0.47	0.54

Aspek Pemberantasan Korupsi

INDEKS PERSEPSI KORUPSI



SUMBER: TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2020

Score	Country	Rank	
36	Indonesia	88	2015
37	Indonesia	96	2016
37	Indonesia	90	2017
38	Indonesia	89	2018
40	Indonesia	85	2019
37	Indonesia	102	2020



Jangan Bunuh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



Don't Kill KPK

Corruption Eradication Commission



MAFIOSO Membunuh KPK



Stronger KPK: from legal perspective

1. **Constitutional Organ**
2. **A Better commissioners' selection system**
3. **Limited Immunity for commissioners and staff**
4. **Independent staff, including investigative officer**
5. **More Budget**
6. **More Powers, or at least the same**
7. **Representative Office**
8. **A better supervision system**

Stronger KPK: from legal perspective



1. Constitutional Organ
2. A Better commissioners' selection system
3. Limited Immunity for commissioners and staff.
4. Independent staff, including investigative officer
5. More Budget
6. More Powers, or at least the same
7. Representative Office
8. A better supervision system

KPK is the strongest anticorruption agency in Indonesia's history

THE KILLING
NEVER STOP



(Kartun Majalah Tempo, 12-18 Oktober 2015)

• KPK vs Polisi

“KRIMINALISASI”
GECKO VS CROCODILE



PHYSICAL ATTACK



Balada Angkot Angket KPK

Oleh DENNY INDRAYANA

Apakah hubungan antara hak angket yang diangkat DPR atas KPK dan transportasi angkot yang mengangkut penumpang kota? Sejujurnya, tak ada. Ini hanya susunan kata agar menarik menjadi judul dan enak dibaca. Lalu kenapa ang-

ket diangkat? DPR melihat sepotong ketentuan Pasal 79 Ayat 3 UU MD3 bahwa angket ditujukan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, dalam hal ini UU KPK. Lebih jauh, para pendukung angket berpendapat pimpinan KPK sebagai pejabat negara tidak menjalankan rekomendasi hasil rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR (Pasal 98 Ayat 7 UU MD3)

Penjelasan Pasal 3 mengatur: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'kekuasaan mana pun' adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun de-

dan/atau menyerahkan dokumen—termasuk BAP pemeriksaan Miryam Haryani. Pihak yang tidak memenuhi panggilan panitia angket dapat dikenai hukuman sandera meskipun paling lama hanya 15 hari. Berbeda dengan hak angket kepada kebijakan pemerintah yang dapat berujung dengan pemakzulan presiden, akhir dari angket DPR atas KPK ini tidak terlalu jelas

berantasan korupsi dan mengangkut angket DPR. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dibela dan dilindungi, atau lebih tepatnya, siapa dan mengapa?

DENNY INDRAYANA
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM; Profesor Tamu di Melbourne Law School dan Faculty of Arts University of Melbourne, Australia



INQUIRY RIGHT: THE NEW M.O.

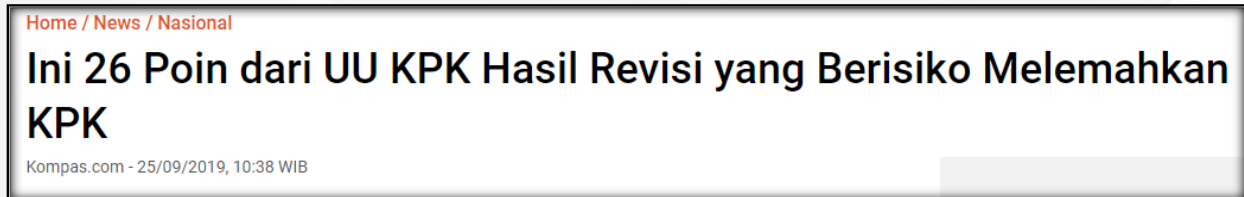
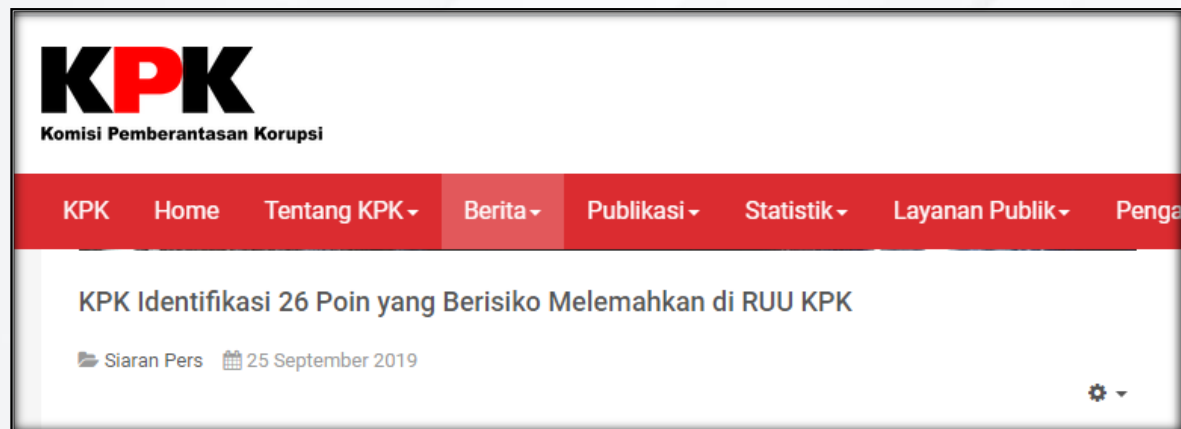
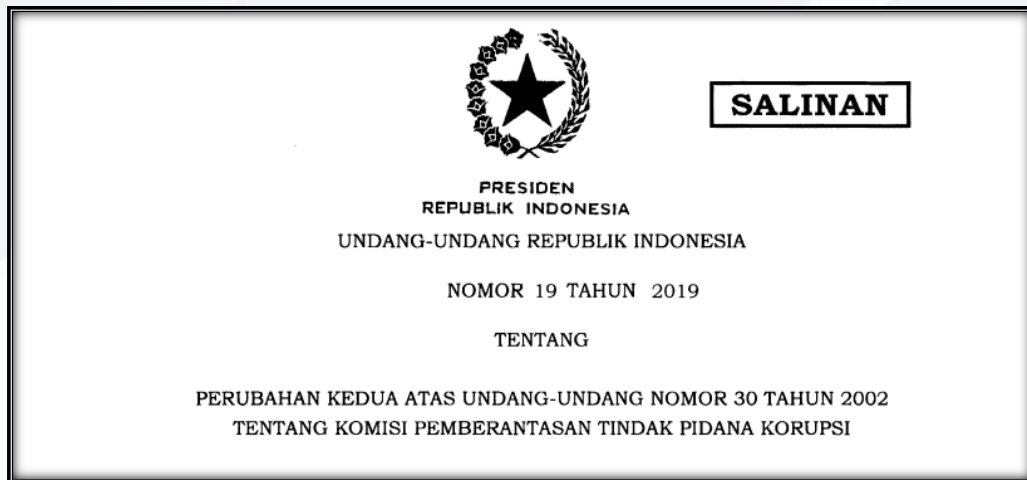
Pembunuhan KPK Secara Terstruktur

<http://www.integritylawfirm.id/buku/>

Don't
Kill
KPK
Corruption Eradication Commission



Melalui Revisi UU KPK, Ada Pelumpuhan KPK



- 26 Pelemahan KPK di dalam UU 19/2009
- Presiden berdiri di dua kaki, tidak menandatangani UU 19/2019 padahal ikut andil dalam persekongkolan jahat

Krisis Etika Pimpinan KPK



2 Orang Pimpinan KPK Melanggar Kode Etik

Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik!

Tim detikcom - detikNews

Kamis, 24 Sep 2020 10:23 WIB

CNBC Indonesia > News > Berita

Tercoreng! Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Langgar Kode Etik

NEWS - dob, CNBC Indonesia | 30 August 2021 12:55

Menyingkirkan Pegawai KPK yang Berintegritas

- Melalui Tes Wawasan Kebangsaan, 51 pegawai KPK diberhentikan. Awalnya berjumlah 75, 24 diantaranya dinilai masih bisa dibina;
- Diantaranya Novel Baswedan, Giri Suprapdiono, Sujanarko dan Harun Al Rasyid;
- Ombudsman Republik Indonesia menemukan pelanggaran dalam TWK;
- Komnas HAM menilai pemberhentian pegawai KPK merupakan pelanggaran HAM.

Home > News > Nasional

51 Pegawai KPK Diberhentikan per 1 November 2021

Selasa 01 Jun 2021 13:24 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Indira Rezkisari

NASIONAL

Dugaan Persekongkolan Menyingkirkan Pegawai KPK

Sejumlah pemimpin lembaga negara diduga berada di balik pengusuran 75 pegawai KPK. Sebagian pegawai merupakan penyidik yang tengah mengusut kasus besar yang melibatkan elite partai politik.

EDISI, 9 JUNI 2021

Novel Baswedan: Ada Agenda Singkirkan Pegawai KPK yang Baik

CNN Indonesia | Rabu, 26/05/2021 19:53 WIB

PENURUNAN KINERJA KPK

Grafik Penanganan Perkara

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelidikan	96	123	164	142	111	41
Penyidikan	99	121	199	145	91	22
Penuntutan	76	103	151	153	75	34

Diolah dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik>

Institusi	Tingkat Kepercayaan Publik
Kepolisian	86,2%
Mahkamah Agung	85,9%
Kejaksaan Agung	82,2%
KPK	80,7%

Survei Cyrus Network 22 Juni 2021 diperoleh dari cnn.com



INDEKS PERSEPSI KORUPSI



SUMBER: TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2020

Score	Country	Rank	
36	Indonesia	88	2015
37	Indonesia	96	2016
37	Indonesia	90	2017
38	Indonesia	89	2018
40	Indonesia	85	2019
37	Indonesia	102	2020







<https://www.integritylawfirm.id/buku/>

Jakarta 10270
e-mail: buku@kompas.com
Telp. (021) 5347710, ext. 5501

ISBN: 978-979-709-367-9



Negeri Para Mafioso

denny@integritylawfirm.id ISBN 27008028

201920

Negeri Para Mafioso

Hukum di Sarang Koruptor

Denny Indrayana

KOMPAS

Negeri Para Mafioso

Hukum di Sarang Koruptor



Denny Indrayana

Kata Pengantar: Prof. Ahmad Syafii Maarif

IN TE
GRI TY

Pembatalan PP 99/2021 oleh Mahkamah Agung Membuka peluang obral Remisi bagi Koruptor

Aturan Dicabut MA, Koruptor Kini Lebih Gampang Dapat Remisi

Tim detikcom - detikNews

Jumat, 29 Okt 2021 13:02 WIB

17 komentar

SHARE



Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)

1. Inkonsistensi Mahkamah Agung setelah Putusan MA setelah Putusan No.51/2013 dan 56/2013. Pertimbangan putusan yang keliru dan manipulatif.
2. Meski Amar Menolak, Tetapi Pertimbangan Putusan MK 41/Puu-xix/2021 Menjadi Pintu Masuk Pembatalan Pp 99 Di MA.
 - Isu Diskriminatif
 - Isu HAM
 - Isu Pendekatan *Restorative Justice*
 - Isu *Overcrowded*
3. Alasan *Overcrowded* tidak berdasar. Data Ditjen PAS tertanggal 1 November 2021, menunjukkan Napi Koruptor tidak menyebabkan *Overcrowded*

1. Kita *setback* lagi dalam pemberantasan korupsi.
2. Di era terkini, pemberantasan korupsi Kembali dilemahkan.
3. Pemberantasan korupsi tidak lagi luar biasa.
4. KPK dilumpuhkan.
5. **PP 99 dibatalkan, Remisi koruptor diobral.**



What Next? Solusi

Putus hubungan kolusif penguasa
dan pengusaha

Penguasa harus lebih independen
dari kepentingan bisnis

Penegakan hukum harus lebih tegas

Mafia hukum harus diberantas

KPK harus diperkuat, bukan
diperlemah, apalagi dimatikan

Aspek Hak Asasi Manusia

Konstitusi Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia



- ☞ Diatur di dalam Bab tersendiri, yakni Bab XA (Pasal 28A – Pasal 28J)
- ☞ Juga tersebar di pasal lain dalam UUD 1945, seperti:
 - Pasal 27 (Pekerjaan yang layak)
 - Pasal 31 (Pendidikan)
- ☞ Dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

JANJI KOSONG JOKO WIDODO SOAL HAM

tirto.id

"Penanganan kasus2 korupsi, penganiayaan, pelanggaran HAM, dll yg belum selesai, harus dipercepat demi rasa keadilan masyarakat"
Twit @jokowi, 1 Agustus 2017



Peristiwa Trisakti, Semanggi I, & Semanggi II

16 tahun lalu berkas rampung. Kejaksaan Agung (Kejagung) 3 kali mengembalikan berkas ke Komnas HAM



Menko Polhukam Wiranto

- Panglima ABRI dalam Kasus Trisakti, Semanggi I, & Semanggi II
- Pangab & Menteri Pertahanan dalam kasus Timor Leste

Peristiwa 1965-1966

Sejak 6 tahun terbentuk tim Ad Hoc, Kejagung 3 kali mengembalikan berkas ke Komnas HAM

Peristiwa Wasior di Papua Barat & Wamena di Papua

13 tahun lalu berkas rampung. Kejagung 3 kali mengembalikan berkas ke Komnas HAM



Hendropriyono

- Komandan Korem 043/Garuda Hitam dalam kasus Talangsari
- Kepala BIN dalam kasus Munir

Kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998

11 tahun lalu berkas rampung. Kejagung 3 kali mengembalikan berkas ke Komnas HAM



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu

Panglima Kostrad dalam kasus Dorthneys Hiyo Eluay

Kasus kerusuhan Mei 1998

14 tahun lalu berkas rampung. Kejagung 3 kali mengembalikan berkas ke Komnas HAM

tirto.id

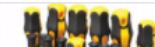
Sumber: Chega!, KontraS & tim riset tirto.id Infografik: Mojo

Permasalahan HAM Bukan Menjadi Fokus yang Untuk Diselesaikan

IN TE
GRI TY

Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 17/10/2019, 17:50 WIB



- Periode I : Presiden Jokowi menjanjikan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu
- Periode II : Mengulang janji di periode pertama



ANCAMAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN KEBEBASAN PERS MAKIN NYATA

“Pekerjaan Rumah” Pelanggaran HAM yang Belum Tuntas (II)



2 | Peran Generasi Millenial

A person in a blue suit is holding a tablet. On the tablet, there are glowing icons of human figures. The background is dark with some light spots.

MAHASISWA SEBAGAI AGENT OF CHANGE

MAHASISWA TUMBAL REFORMASI

IN TE
GRI TY



BERITA > NASIONAL

4 Mahasiswa Trisakti yang Gugur Disebut Sebagai Syuhada Reformasi

Rabu, 12 Mei 2021 | 10:56 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari



Photo : Antara.

Empat mahasiswa Trisakti yang tewas ditembak saat reformasi 98.



denny@dennyindrayana.com

Mahasiswa Millenial yang kritis:

- 1. Manfaatkan media sosial sebagai kontrol kebijakan Pemerintah**
- 2. Manfaatkan Platform yang ada guna memberi masukan, kritik guna pembangunan hukum yang baik**
- 3. Tingkatkan Jejaring kesemua penjurur**
- 4. Tidak mengikuti tindakan koruptif generasi terdahulu apabila nantinya ikut andil dalam pemerintahan**

HAKIKAT MAHASISWA YANG PARIPURNA

- 1. Mahasiswa Adalah Gerakan Moral Yang Genuine Yang Harus Berjarak Dengan Pemerintah**
- 2. Independensi modal utama - Jangan Mudah Dikooptasi baik di kampus atau oleh kekuasaan negara**

CIRI MAHASISWA YANG PARIPURNA

- 1. Sikap kritis dan Idealisme**
- 2. Tanggung jawab pengabdian berada pada pundak Mahasiswa**
- 3. Rawat Empati dan Elan Perjuangan Aktivisme**
- 4. Penjaga Etika dan Moral**
- 5. Pengamalan Tridarma Perguruan Tinggi**

HAKIKAT MAHASISWA

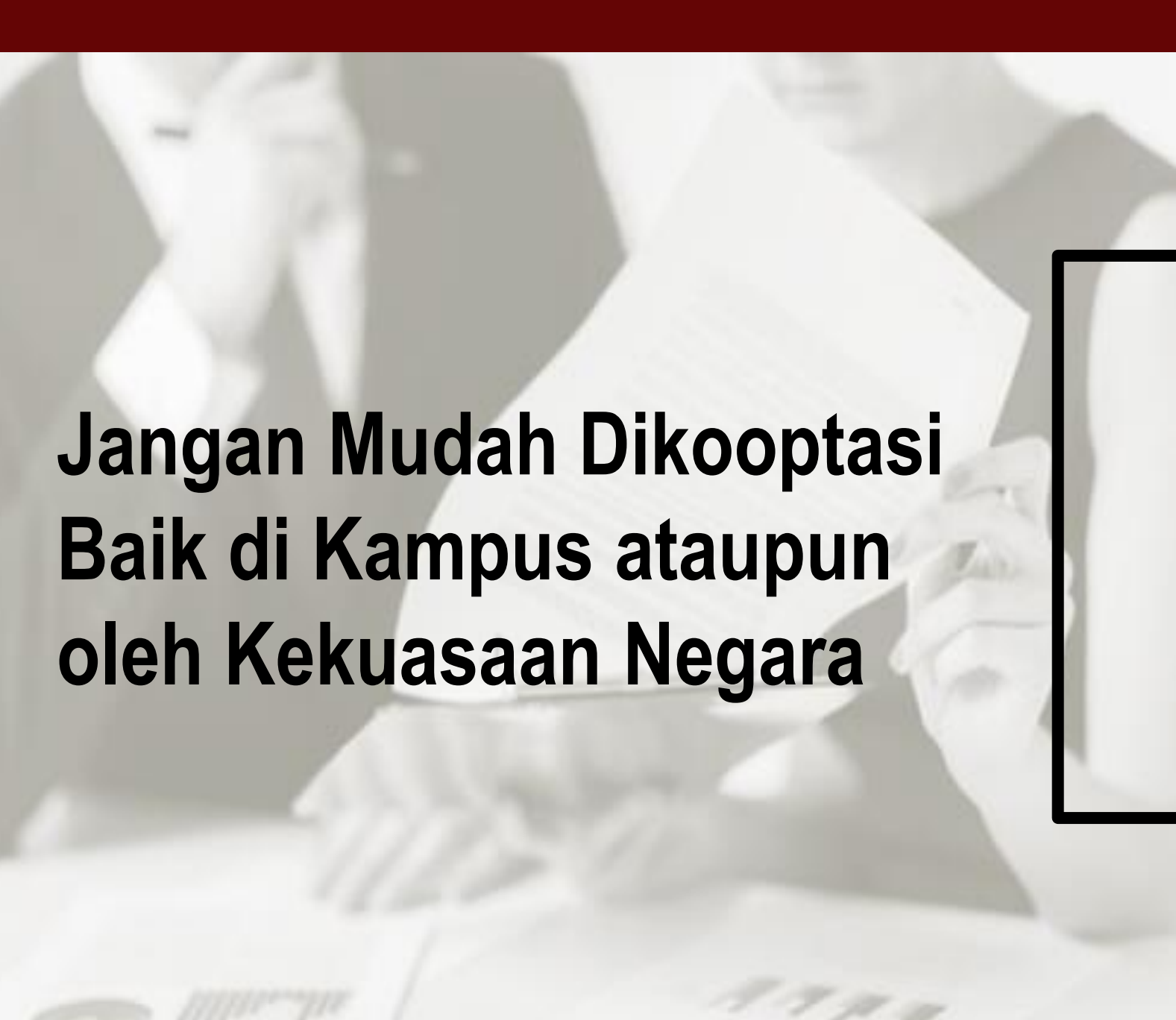
- Mahasiswa = miniatur masyarakat intelektual yang memiliki corak keberagaman pemikiran, gagasan dan ide-ide yang penuh dengan kreativitas.
- Dengan **Intelektualitas**, **Idealisme** dan **Integritas**, mahasiswa menjadi entitas yang memiliki paradigma ilmiah dalam memandang persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan.



HAKIKAT MAHASISWA

Mahasiswa adalah gerakan moral yang *genuine*, harus terus berjarak dengan kekuasaan





**Jangan Mudah Dikooptasi
Baik di Kampus ataupun
oleh Kekuasaan Negara**

**INDEPENDENSI
ADALAH
MODAL UTAMA**

Pertahankan sikap Kritis dan Idealisme

DAYA KRITIS MAHASISWA ADALAH KENISCAYAAN

- Secara demokratis, konflik vertikal antara masyarakat sipil dan pemerintah atau antara mahasiswa dan pemerintah bukanlah hal tabu.
- Adu argumentasi, kritikan, protes, dan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah keniscayaan demokrasi.

- Mahasiswa sebagai subjek penting dunia kampus mesti selalu terlibat dalam mewujudkan tridarma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan **pengabdian pada masyarakat**
- **Tugas mahasiswa bukan sekadar bergumul dengan buku-buku atau diktat-diktat kuliah hasil olahan para dosen dalam menara gading kampus atau di kamar pribadi tanpa membuat refleksi dan mengkonfrontasikan ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan situasi konkret yang terjadi di tengah masyarakat**

MAHASISWA MEMILIKI TANGGUNGJAWAB PENGABDIAN



TERUS RAWAT EMPATI DAN ELAN PERJUANGAN AKTIVISME

MAHASISWA HARUS MENJADI PENJAGA ETIKA MORAL BERBANGSA



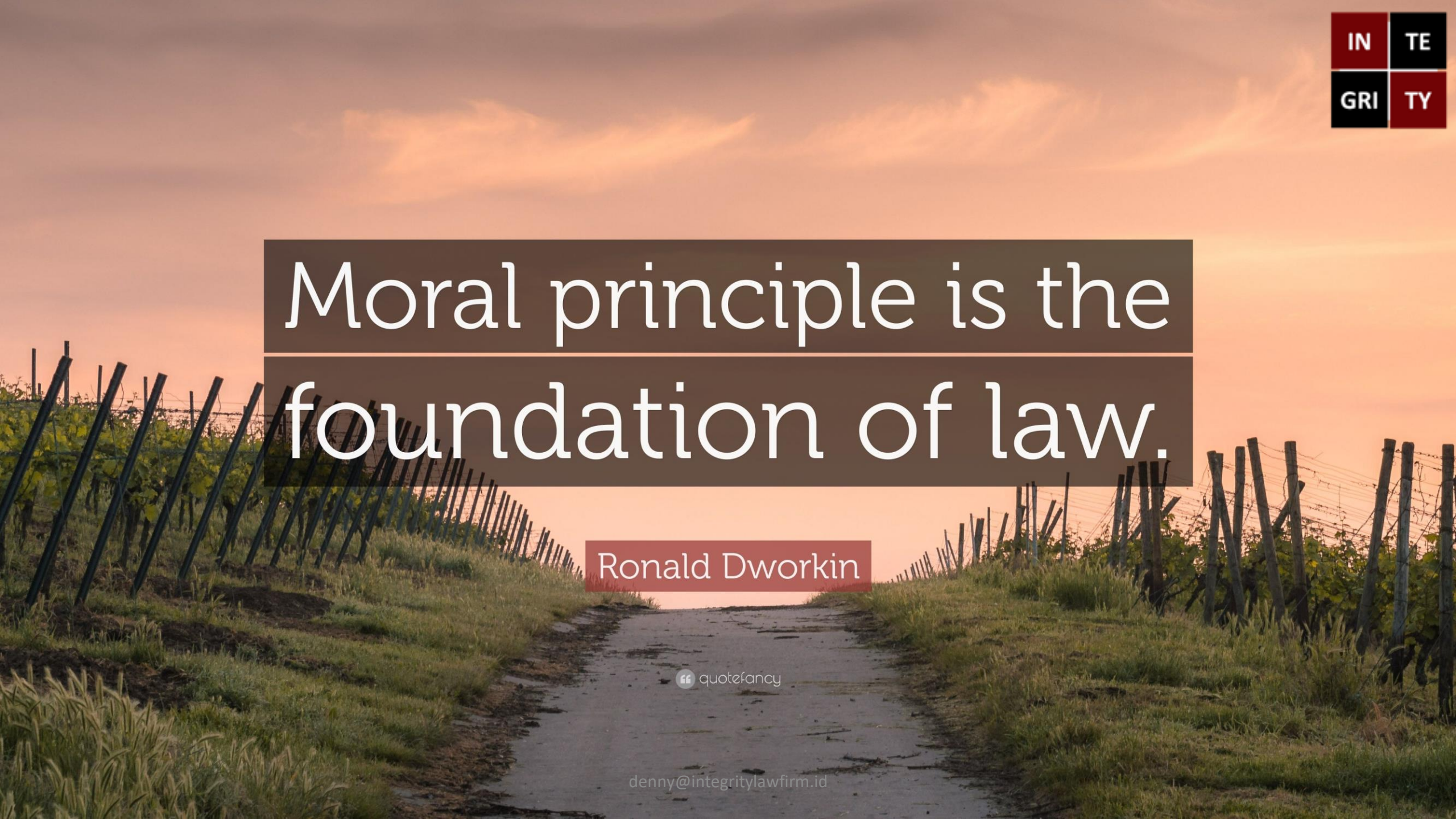
1. **Etika Sosial & Budaya**
2. **Etika Politik & Pemerintahan**
3. **Etika Ekonomi & Bisnis**
4. **Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan**
5. **Etika Keilmuan**
6. **Etika Lingkungan**

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VI/MPR/2001**

TENTANG

ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

A dirt road with a large puddle in the center leads into a vineyard. The vines are supported by wooden stakes and are silhouetted against a bright orange and yellow sunset sky. A large, semi-transparent dark rectangle is centered over the image, containing the quote in white text.

Moral principle is the
foundation of law.

Ronald Dworkin

quote fancy

denny@integritylawfirm.id

PASCA KAMPUS, WHAT NEXT?

5 Tipe Intelektual :

1. Golongan Intelektual sejati yaitu mereka yang tingkah lakunya ditentukan oleh kejujuran dan logika.
2. Golongan intelektual yang begitu frontal memperjuangkan kebenaran, namun tidak dapat bertahan di hadapan kekuatan kekuasaan yang senantiasa menuntut korban nyawa bagi para pejuang kebenaran.
3. Golongan intelektual yang mudah terpengaruh, ikut arus, dan tidak konsisten dengan kebenaran
4. Golongan intelektual yang menggunakan kemampuan intelektualnya untuk kepentingan dirinya.
5. Golongan intelektual yang bekerja sama dengan para penguasa.

Y. B. Mangunwijaya, "Cendekiawan dan Pijar-Pijar Kebenaran", dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (penyunting), Cendekiawan dan Politik (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1984), hlm. 103-104



KRITIK = VITAMIN DEMOKRASI
Kritik Mahasiswa = NISCAYA



MENJADI MAHASISWA ULIL ALBAB MELAWAN MAFIOSO

5 KRITERIA ULIL ALBAB - Jalaluddin Rahmat

1. Kesungguhan mencari ilmu dan kecintaannya **mensyukuri nikmat** Allah (QS. Ali Imran: 190)
2. Memiliki kemampuan **memisahkan sesuatu dari kebaikan dan keburukan**, sekaligus mengarahkan kemampuannya untuk memilih dan mengikuti kebaikan tersebut (QS. Al-Maidah:100)
3. **Bersikap kritis** dalam menerima pengetahuan atau mendengar pembicaraan orang lain, memiliki kemampuan menimbang ucapan, teori, proposisi dan atau dalil yang dikemukakan orang lain (QS. Al-Zumar: 18)
4. Memiliki kesediaan untuk **menyampaikan ilmunya kepada orang lain** memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki masyarakat serta terpenggil hatinya untuk menjadi pelopor terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat (QS. Ibrahim: 52 dan al-Ra'd: 19-24)
5. Merasa **takut hanya kepada Allah** (QS. Al-Baqarah: 197 dan al-Thalaq: 10)



ULIL ALBAB

Dua Sisi Saling Melengkapi

IMTAQ - IPTEK
SOFT SKILL - HARD SKILL

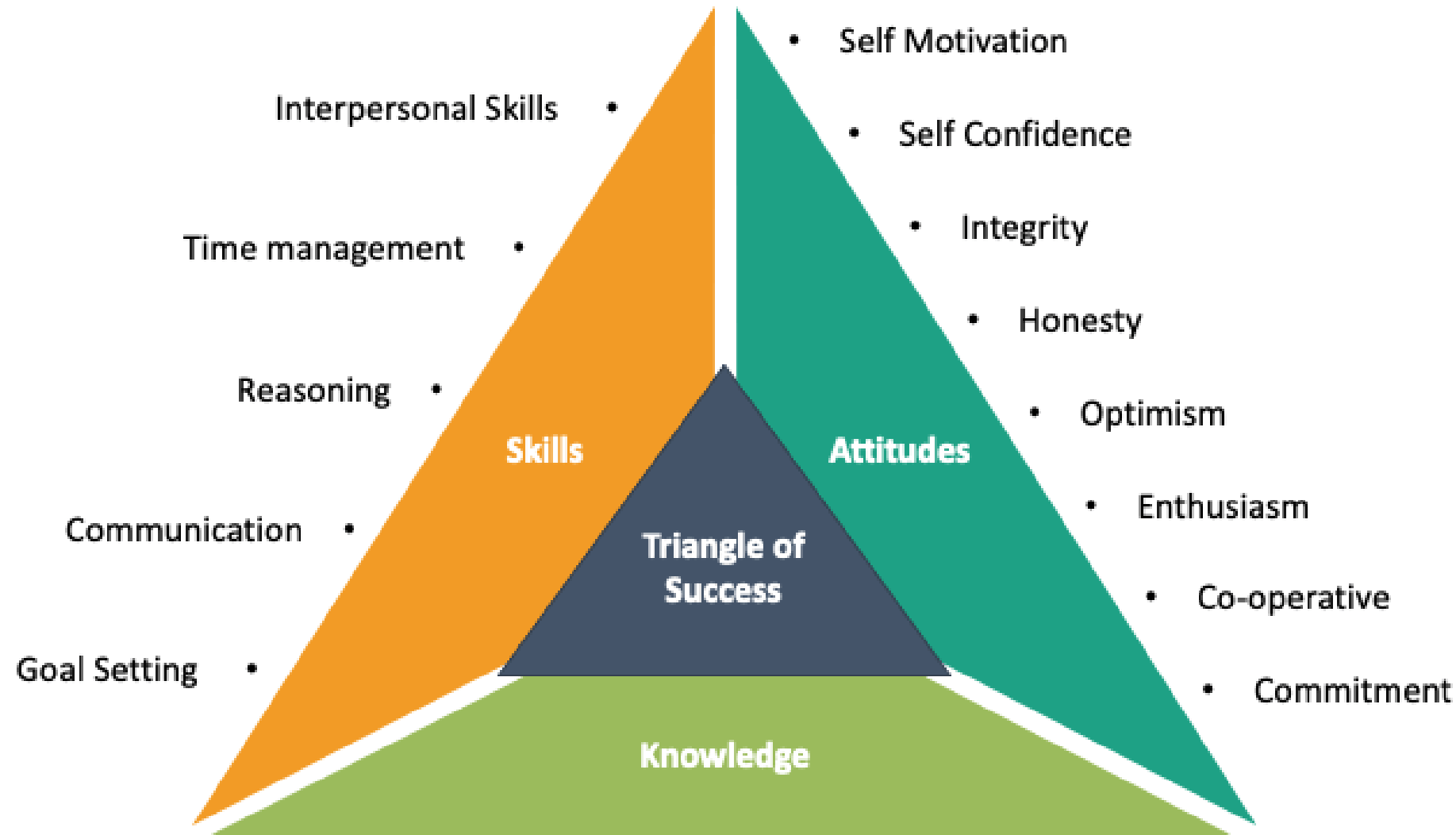


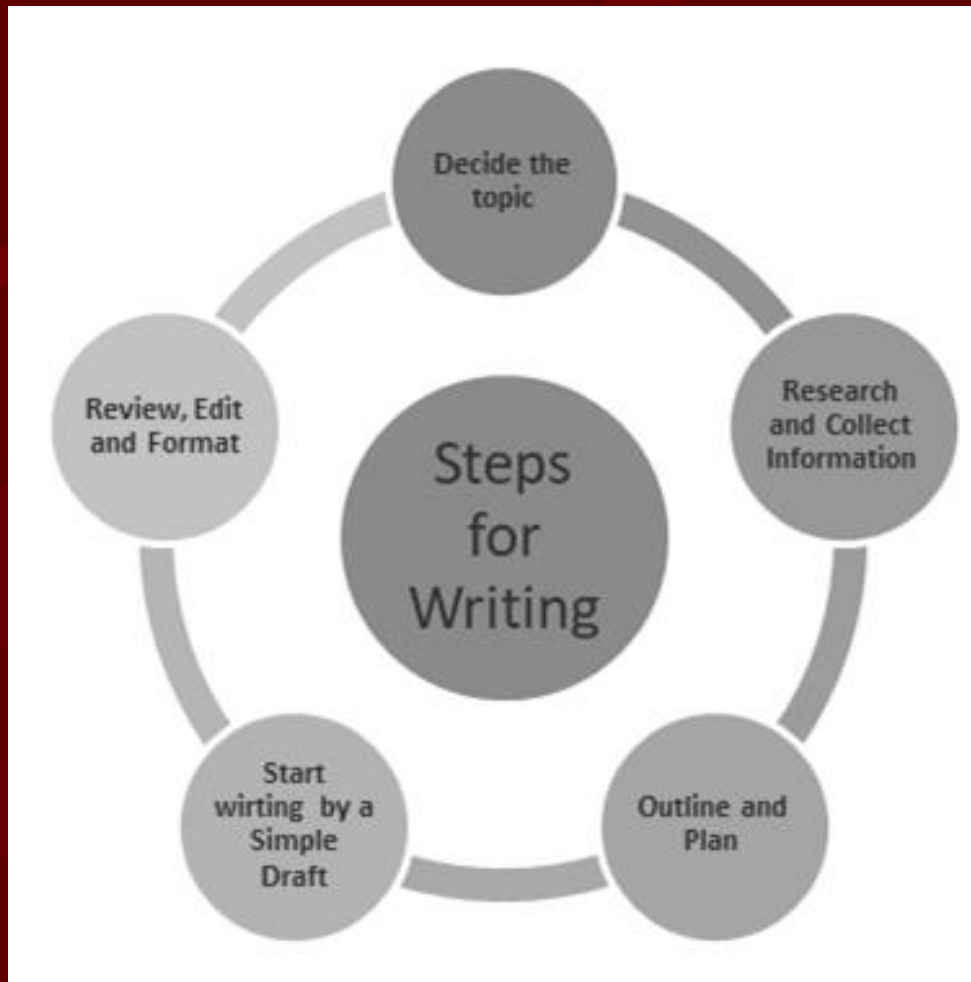
SKILLS REQUIRED TO BECOME A SUCCESSFUL LAWYER



LEGAL KNOWLEDGE
PENGUASAAN ILMU HUKUM DASAR

KNOWLEDGE SKILLS ATTITUDE





a. Banyak Membaca

b. Membaca, Diskusi, Menulis

c. Drafting Skill banyak Bermasalah

d. Perbanyak Workshop *Legal Writing*

e. Ikuti kompetisi penulisan dan penelitian

Writing Skill



- a. Attitude
- b. Convincing
- c. Speaking Skill
- d. Juara Debat Konstitusi
- e. Perbanyak ikut kompetisi yang mengasah Logika pikir
- f. Jadilah aktivis – ORGANISASI!!!

Negotitation Skill



- a. Jejaring penting
- b. Marketing skill

**Apalagi, kantor sendiri.
Tidak bisa jadi partner,
tanpa marketing skill**

NETWORKING



- a. Computer*
- b. Languages*

Technical Skill

INTEGRITY

TIDAK TERBELI !
NO Mafia Hukum !



“Integrity is doing
the right thing,
even when no one
is watching.”

C. S. Lewis

INTEGRITY Programs

IN
TE
GRI
TY

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
NARAHUBUNG
LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
AKA Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yusep Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kaltas 5TH - Jakarta

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

SESI V
Fabel Diansyah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Pulis, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat
Perimbangan Hukum JAMKATON KESABUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Rabu, 28-29 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Sesiology Materi Legal Training
- Sesiology Buku dari Peneliti

MATERI TRAINING

SESI I

1. Menganalisis Tidak Polusi Korupsi Internal Korporasi
2. Menganalisis Tidak Polusi Korupsi yang Internal Korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Penindakan yang Internal Korporasi
2. Menganalisis Perjanjian dan Perjanjian Tidak Polusi Korupsi
3. Menganalisis Perjanjian dan Perjanjian Tidak Polusi Korupsi

SESI III

1. Penindakan yang Internal Korporasi dan Perjanjian Tidak Polusi Korupsi
2. Studi Kasus Implementasi dan Perjanjian Tidak Polusi Korupsi

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Membangun Pencegahan dan Penindakan yang Internal Korporasi dan Perjanjian Tidak Polusi Korupsi
3. Membangun Pencegahan dan Penindakan yang Internal Korporasi dan Perjanjian Tidak Polusi Korupsi

SESI V

1. Pengendalian korupsi: strategi dan konsep pencegahan korupsi
2. Strategi pencegahan korupsi: strategi dan konsep pencegahan korupsi
3. Studi kasus

SESI VI

1. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Perjanjian Tidak Polusi Korupsi
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Perjanjian Tidak Polusi Korupsi
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Full Paket Materi (Paket 3 hari)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
5511000000
KCS PO INDAH WATI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
melalui link www.integritylawfirm.id

NARAHUBUNG Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2488

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Sekeloa Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. **Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bi.** **Fahmi H. Rani, S.E., M.A.**
Senior Partner INTEGRITY Law Firm **Senior Partner INTEGRITY Law Firm** **Senior Partner INTEGRITY Law Firm**

MODERATOR
Karnis, 12 Agustus 2021 **Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB**

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD1

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDAMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Muh. Mahfud MD **Yudi Latief** **Ariul Sami**
Senior Partner INTEGRITY Law Firm **Ketua PKH Indonesia** **Wakil Ketua PKH RI**

MODERATOR

M. Rudi Satrio **Wahyuni Satrio** **Denay Indrayana**
Senior Partner INTEGRITY Law Firm **Associate VICE - Jakarta** **Senior Partner INTEGRITY Law Firm**

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD2

Tersedia e-certificate

Karnis, 30 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Registrasi dibuka di www.integritylawfirm.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denay Indrayana **Muh. Thaqi** **Rafly Harun**
Senior Partner INTEGRITY Law Firm **Managing Partner INTEGRITY Law Firm** **Partner INTEGRITY Law Firm**

MODERATOR

Rahma Izza Nurhidayah **Titi Anggrani** **Titi Lidyawati**
Senior Partner INTEGRITY Law Firm **Senior Partner INTEGRITY Law Firm** **Senior Partner INTEGRITY Law Firm**

Tersedia e-certificate

Karnis, 17 September 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD3

Registrasi dibuka di www.integritylawfirm.id

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

Visit  at:

<http://www.integritylaw.id>



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

Indrayana Centre for Government,
Constitution, and Society

